

## PROFIL DAYA SAING DESA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ridwan

ridwan@janabadra.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra Yogyakarta

### ABSTRAK

*Daya saing desa merupakan akar dari daya saing daerah ditingkatkan lebih tinggi yaitu daya saing regional dan nasional. Kemampuan Desa dalam meningkatkan daya saingnya akan sangat tergantung pada kemampuan Desa tersebut dalam menemukan faktor-faktor yang dapat mendorong daya saing. Tulisan ini bertujuan untuk membangun indeks daya saing desa dengan menganalisis faktor pembentuk daya saing desa di Provinsi D.I.Yogyakarta yang meliputi 392 Desa. Dimensi penelitian terdiri atas pendidikan, kesehatan, perekonomian, aksesibilitas fisik dan informasi, serta keuangan dan kelembagaan. Keseluruhan data ditransformasikan sedemikian rupa sehingga menjadi "comparable". Metode standardized score dipergunakan untuk mengetahui seberapa bagus kinerja suatu Desa tertentu dibandingkan dengan rata-rata Desa secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan dimensi kelembagaan desa memberi kontribusi terbesar dalam pembentukan indeks daya saing desa, sementara dimensi perekonomian kontribusinya rendah dibandingkan dimensi lain terhadap indeks daya saing desa di Provinsi D.I. Yogyakarta.*

**Keyword:** *daya saing, Desa, kelembagaan, dimensi perekonomian standardized score*

### ABSTRACT

*Village competitiveness is the root of regional competitiveness at a higher level, namely regional and national competitiveness. The ability of the village to increase its competitiveness will depend on the ability of the village to identify factors that can encourage competitiveness. This paper aims to build a village competitiveness index by analyzing the factors forming village competitiveness in D.I.Yogyakarta Province which includes 392 villages. The dimensions of the research consist of education, health, economy, physical and information accessibility, as well as finance and institutions. The entire data is transformed in such a way that it becomes "comparable". The standardized score method is used to find out how well the performance of a particular village is compared to the average village as a whole. The results showed that the village institutional dimension gave the largest contribution to the formation of the village competitiveness index, while the economic dimension had a low contribution compared to other dimensions to the village competitiveness index.*

**Keywords:** *competitiveness, village, institutional, economic dimension, standardized score*

### PENDAHULUAN

*World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara (Schwab dan Porter, 2007). Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi, dan*

*daya saing tinggi berpotensi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, WEF mengelompokkan determinan pendorong produktivitas ke dalam beberapa pilar daya saing, Pilar-pilar tersebut selanjutnya dikelompokkan*

menjadi tiga kelompok pilar, yaitu: Kelompok persyaratan dasar (*basic requirements*) yang berperan penting sebagai faktor pendorong daya saing ekonomi; Kelompok penopang efisiensi (*efficiency enhancers*) yang memainkan peran penting sebagai faktor pendorong efisiensi dalam perekonomian; Kelompok inovasi dan kecanggihan bisnis (*innovation and sophistications*) merupakan faktor utama pendorong inovasi dalam perekonomian.

Definisi daya saing yang dikemukakan WEF di atas menghubungkan antara pengertian daya saing dari aspek mikro (level perusahaan) ke tingkat makro (level negara). Pandangan ini menggambarkan kapasitas perusahaan untuk bersaing, berkembang dan menghasilkan keuntungan relatif tidak terbantahkan, namun menerapkan konsep yang sama untuk negara atau daerah dapat memunculkan banyak perdebatan (Martin *et al.* 2006). Gagasan daya saing menjadi perdebatan konseptual selama beberapa tahun terakhir ini. Beberapa ahli beralasan bahwa konsep daya saing lebih tepat digunakan untuk perusahaan (*firm*) dan bukan “wilayah atau daerah.” Namun, belakangan ini beberapa penelitian berbasis ilmiah dan praktis telah berkembang dengan tujuan menemukan landasan konseptual dan bukti empiris guna mengukur daya saing daerah (Huggins *et al.* 2014).

Ada tiga isu utama yang muncul dalam perdebatan mengenai penafsiran daya saing daerah: *Pertama*, bagaimana mendefinisikan daya saing daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya; *Kedua*, apa indikator yang harus digunakan untuk mengukurnya; *Ketiga*, bagaimana daya saing daerah ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi. *Ketiga* pertanyaan tersebut biasanya menjadi perdebatan terletak pada latar belakang masing-masing pakar, ahli ekonomi berkonsentrasi pada isu yang pertama, peneliti ekonomi regional fokus pada pertanyaan yang kedua, sementara para ahli kebijakan daerah dan pengambil keputusan cenderung fokus pada isu yang ketiga (Barkley, 2008).

Kitson *et al.* (2004) menggunakan tiga indikator untuk mengukur daya saing yaitu: produktivitas daerah, tingkat kesempatan kerja dan standar hidup. Pandangan ini mengklaim

bahwa daya saing juga dipengaruhi oleh unsur-unsur ‘*hard*’ dan ‘*soft*’. Dasar dari keunggulan kompetitif (daya saing) daerah adalah: kapital produktif, *human capital*, modal sosial-kelembagaan, modal budaya, modal infrastruktur, dan pengetahuan atau modal kreatif. Pandangan Kitson sejalan dengan studi Lengyel *et al.* (2013) yang menemukan *human capital* dan *social capital* merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap daya saing suatu negara. Dalam studi ini PDRB per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat kesempatan kerja merupakan representasi dari daya saing.

Sementara, Porter (2007) menyarankan menggunakan kemakmuran, diukur dengan standar hidup dan kesenjangan untuk mengukur daya saing daerah. Kemakmuran, didefinisikan sebagai pendapatan per kapita didekomposisi menjadi dua faktor yaitu produktivitas tenaga kerja dan tingkat kesempatan kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah keterampilan, modal, dan jumlah faktor produktivitas. Faktor kesempatan kerja dipengaruhi oleh jam kerja, pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Berbeda dengan konsep daya saing sebelumnya Bristow (2005) mengemukakan dari sudut pandang ekonomi makro, dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi mikro (tingkat perusahaan) dan output suatu daerah (“kemakmuran”). Pandangan ini menegaskan bahwa daya saing daerah dan kemakmuran regional sebenarnya adalah pengertian yang saling tergantung. Daerah A, misalnya, adalah kompetitif menurut pandangan ini, ketika daerah tersebut memiliki kondisi untuk memungkinkan dapat meningkatkan standar hidup, atau kemampuan untuk mempertahankan hasil (*outcome*) yang telah dicapai. Keunggulan kompetitif perusahaan dan daya tarik lingkungan regional untuk bisnis, serta volume dan tingkat di mana sumber daya manusia di wilayah ini dimanfaatkan merupakan faktor penting pembentuk daya saing daerah. Oleh karena itu, tingkat daya saing dapat bervariasi di antara masing-masing daerah dalam satu ruang geografis, tergantung pada faktor penggerak pertumbuhan (Audretsch dan Keilbach, 2004).

Di sisi lain, Delgado *et al.* (2012) mendefinisikan daya saing sebagai tingkat output yang diharapkan per penduduk usia kerja dengan didukung oleh keseluruhan potensi sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Menurut mereka, faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing yaitu: Infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) dan Institusi politik (kualitas institusi politik dan aturan hukum); Kebijakan moneter dan Fiskal; dan Lingkungan ekonomi mikro. Demikian juga daya tarik investasi juga memengaruhi daya saing suatu negara. Hasil studi Delgado *et al.* (2012) pada 130 negara untuk periode 2001 hingga 2008 menunjukkan bahwa tiap faktor pendorong daya saing berpengaruh positif terhadap output per tenaga kerja.

Dapat disimpulkan bahwa antara level makro dan mikro ditemukan konsep daya saing daerah di mana sebuah daerah dalam konteks negara bukan merupakan agregasi perusahaan (Gardiner *et al.* 2004). Meyer-Stamer (2008) menyatakan bahwa: "Kita dapat menentukan secara sistemik daya saing suatu daerah sebagai kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut." Berbeda dengan definisi WEF yang fokus pada konsep produktivitas, definisi ini didasarkan sepenuhnya pada manfaat yang diperoleh orang-orang yang tinggal di suatu daerah. Hal ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara daya saing dan kesejahteraan. Ini berarti bahwa daerah yang kompetitif tidak hanya terkait dengan output yang dihasilkan seperti produktivitas, tetapi juga berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (Bristow, 2005).

Secara implisit dapat dianggap bahwa daya saing daerah haruslah berasal dari kegiatan "*bottom-up*" dengan berfokus pada peningkatan sistem lokal. Perspektif ini menyerupai pandangan teori pembangunan endogen, dimana tempat atau daerah bertindak sebagai suatu bentuk organisasi yang mengkoordinir dan memfasilitasi keunggulan kompetitif atau daya saing yang berkelanjutan (Garofoli, 2002; Lawson dan Lorenz, 1999; Maillat, 1998). Camagni (2002) lebih lanjut mengemukakan bahwa konsep daya saing daerah dapat diterima

secara teoretis, karena peran daerah dalam menyediakan lingkungan yang kompetitif untuk perusahaan dan proses akumulasi pengetahuan.

Dengan demikian, daerah semakin dianggap memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di era ekonomi global saat ini (Cooke, 2004; Malecki, 2007; Werker dan Athreye, 2004). Fokus pada daerah mencerminkan konsensus yang berkembang bahwa daerah adalah unit spasial utama yang bersaing untuk menarik investasi, dan pada tingkat daerah pula pengetahuan disebarkan dan ditransfer, sehingga terbentuk aglomerasi perusahaan-perusahaan sektor industri maupun jasa di daerah tersebut.

Tuntutan untuk meningkatkan daya saing yang didukung oleh segala kemampuan dan sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi agar mampu bertahan dan sekaligus memenangkan persaingan di era globalisasi. Oleh karenanya, kebijakan ekonomi seharusnya diarahkan pada peningkatan daya saing agar menjadi *winner* dan bukan *losser*. Di era otonomi daerah saat ini dimana masing-masing daerah memiliki wewenang mengatur daerahnya sendiri, daya saing bangsa sangat tergantung pada daya saing daerah. Tantangan ini selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia akan berimplikasi pada kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing daerahnya sebagai penentu keberhasilan pembangunan nasional.

Demikian halnya dengan desa sebagai unit spasial utama dari sebuah daerah menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing regional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa.

Sebagai tulang punggung transformasi perekonomian, daya saing desa merupakan akar dari daya saing daerah ditingkatkan lebih tinggi yaitu daya saing regional dan nasional. Daya saing desa yang kuat diyakini akan membuat daya saing regional dan nasional juga akan kuat. Apalagi peran desa sangat penting mengingat sebagian besar penduduk di negara berkembang bermukim di desa dan mayoritas masih dalam kondisi miskin.

Lebih jauh, kemampuan Desa dalam meningkatkan daya saingnya akan sangat tergantung pada kemampuan Desa tersebut dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing dan juga kemampuan Desa dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan daya saing perekonomian relatif terhadap desa-desa lain.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menemukenali faktor-faktor penentu daya saing Desa dan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Lebih lanjut, transformasi dan akselerasi pembangunan haruslah bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan akhir meningkatkan daya saing Desa yang pada gilirannya daya saing regional dan nasional juga turut meningkat.

Tulisan ini bertujuan untuk membangun indeks daya saing desa dengan menganalisis faktor-faktor pembentuk daya saing desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian akan diperoleh peta dan profil daya saing desa untuk 392 Desa di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu, untuk mengetahui faktor dominan yang memengaruhi daya saing desa diantaranya faktor ekonomi, infrastruktur, sosial dan kelembagaan.

Studi yang dilakukan oleh Abdullah (2002) menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peringkat enam dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Studi tersebut menyimpulkan bahwa variabel yang kuat mendukung posisi daya

saing D.I. Yogyakarta adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen mikroekonomi. Variabel-variabel yang merupakan kelemahan bagi daya saing D.I. Yogyakarta meliputi keterbukaan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Variabel-variabel yang bernilai moderat adalah perekonomian daerah, sistem keuangan, kelembagaan, dan *governance* dan kebijakan.

## KAJIAN PUSTAKA

Studi daya saing daerah di Indonesia pernah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan FE Unpad (Abdullah, 2002). Studi tersebut mencakup tingkat provinsi. Indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah: (1) Perekonomian daerah; (2) Keterbukaan; (3) Sistem keuangan; (4) Infrastruktur dan sumber daya alam; (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) Sumber daya manusia; (7) Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah; dan (8) Manajemen dan ekonomi mikro.

Selanjutnya, studi daya saing daerah di Indonesia juga dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Studi KPPOD ini lebih fokus pada daya saing investasi untuk tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2005, studi yang dilakukan oleh KPPOD mencakup 228 kabupaten/kota seluruh Indonesia. KPPOD (2005) menyatakan bahwa investasi yang akan masuk ke suatu daerah akan bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Hasil studi KPPOD menunjukkan bahwa faktor keamanan, politik dan sosial budaya menjadi faktor yang memiliki bobot yang paling besar, yakni sebesar 27 persen terhadap daya saing investasi di kabupaten/kota. Faktor selanjutnya yang berpengaruh, secara berturut-turut, adalah ekonomi daerah (23%), tenaga kerja (18%), infrastruktur fisik (17%), dan kelembagaan (15%). Selain itu, temuan KPPOD juga menunjukkan terdapat dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah-daerah yang mempunyai daya saing tinggi. *Pertama*, daerah-daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian

yang baik. *Kedua*, daerah yang mempunyai daya saing tinggi adalah daerah yang memiliki kondisi keamanan, politik, sosial budaya, dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha. Kombinasi antara kedua faktor dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik yang memadai akan mendukung perkembangan dunia usaha.

Selanjutnya, pada tahun 2008 Bank Indonesia bekerjasama dengan FE Unpad kembali melakukan penelitian mengenai daya saing daerah sebagai kelanjutan penelitian sebelumnya (2001). Cakupan pada penelitian kali ini adalah 434 kabupaten/kota di Indonesia, yang merupakan jumlah daerah kabupaten/kota secara keseluruhan (termasuk di dalamnya daerah-daerah hasil pemekaran) di luar Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data yang mewakili indikator input (37 variabel) dan indikator output (3 variabel). Faktor-faktor yang diduga sebagai pembentuk daya saing daerah dalam penelitian adalah: (1) Perekonomian daerah; (2) Sumber daya manusia dan Ketenagakerjaan; (3) Lingkungan usaha produktif; (4) Infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan; (5) Perbankan dan Lembaga keuangan.

Studi lain mengenai daya saing daerah di Indonesia dilakukan oleh oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy, Universitas Nasional Singapura (Tan *et al.*, 2014) atas daya saing daerah 33 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun komponen daya saing dalam studi ACI tersebut meliputi stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja, serta kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur.

Sementara itu secara spesifik studi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta (2014) menyimpulkan bahwa tingkat daya saing dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) Kinerja makro ekonomi; (2) Keterbukaan ekonomi; (3) Sistem keuangan; (4) Infrastruktur dan sumber daya alam; (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) Sumber daya manusia; (7) Iklim sosial dan politik; (8) Administrasi pemerintahan; dan (9) Pengelolaan industri daerah. Menurut

studi ini tiga besar faktor penentu daya saing yang mempunyai peran terbesar dalam menentukan daya saing D.I. Yogyakarta yaitu: Sumber daya manusia; Kinerja makro ekonomi; dan Modal fisik (infrastruktur) dan sumber daya alam.

Lebih jauh, studi Saputri dan Sirait (2020) mengkaji daya saing desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur. Hasil studi menunjukkan bahwa dimensi keuangan memiliki skor dimensi paling menyebar (*heterogen*) dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal ini menandakan bahwa dimensi keuangan merupakan dimensi utama yang menjadi pembeda kondisi daya saing antar wilayah. Sedangkan dimensi perekonomian memiliki skor dimensi yang paling *homogen*. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi perekonomian memberikan sumbangan paling sedikit terhadap keberagaman kondisi daya saing desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur. Dari sini dapat diketahui bahwa, infrastruktur perekonomian maupun kondisi perekonomian desa seperti keberadaan industri-industri di desa perlu dijadikan prioritas pembangunan untuk peningkatan daya saing desa/kelurahan di Jawa Timur.

Sementara itu, Danindro dan Marhaeny (2020) dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa dimensi perekonomian memiliki nilai indeks yang paling menyebar dibandingkan dimensi lainnya. Hal tersebut mengindikasikan dimensi perekonomian merupakan dimensi yang menjadi pembeda kondisi daya saing antar wilayah. Sedangkan dimensi keuangan dan kelembagaan serta dimensi kesehatan menunjukkan distribusi menceng kanan. Hal ini menandakan bahwa dimensi tersebut cenderung terkonsentrasi pada nilai rendah dengan kata lain tidak cukup berpengaruh terhadap daya saing desa.

Berbagai temuan dari hasil studi daya saing daerah dan desa sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing desa dan daya saing daerah. Kesamaan temuan tersebut adalah bahwa tujuan akhir dari upaya untuk meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu peningkatan *standard of living* dan *quality of life* dari masyarakat yang

berada di dalam perekonomian tersebut. Lebih jauh, konsep dan ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yang tidak hanya dapat diwakili oleh kinerja perekonomian saja, tetapi oleh banyak indikator-indikator non-ekonomi lainnya yang berpengaruh.

Sedangkan perbedaannya terpusat pada cakupan wilayah, di mana daya saing desa mencakup Desa (bagian suatu wilayah daerah), sementara daya saing daerah mencakup wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam berbagai pembahasan tentang daya saing daerah pun, baik secara eksplisit maupun implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing daerah ke dalam konsep daya saing desa. Walaupun demikian, hampir semua pakar memiliki kesamaan pandangan mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, penelitian ini masih dimungkinkan untuk mengeksplorasi hal-hal apa saja yang menjadi faktor-faktor penentu daya saing suatu wilayah.

## METODE PENELITIAN

Perkembangan metode pengukuran daya saing diawali dengan penggunaan indeks komposit oleh berbagai lembaga survei dunia, seperti WEF yang mempublikasikan laporan *Global Competitiveness Report* dan IMD yang menerbitkan laporan tahunan *World Competitiveness Yearbook*. Dalam studinya mengenai daya saing, lembaga-lembaga tersebut menggabungkan sejumlah variabel untuk menghasilkan ukuran daya saing dalam bentuk indeks komposit tunggal (*single composite indeces*). Terdapat beberapa pendekatan untuk membuat suatu indeks dengan menghubungkannya ke dalam satu aspek ekonomi untuk menghasilkan satu indeks tunggal.

Suatu pendekatan lain adalah dengan menggunakan lebih dari satu aspek ekonomi sebagai variabel, pendekatan ini menghindari asumsi bahwa variabel tunggal merupakan ukuran yang menentukan dalam memahami fenomena ekonomi (Castellacci dan Archibugi, 2008). Contohnya adalah OECD yang menerbitkan *Science, Technology, and Industry Scoreboard*. Pendekatan ini menyediakan berbagai perspektif

untuk melihat ke dalam pengetahuan dasar mengenai sebuah perekonomian tetapi tidak memberikan suatu tolok ukur indeks tunggal.

Merujuk pada berbagai jenis pengukuran indeks daya saing yang telah dikemukakan sebelumnya, pada penelitian ini dipergunakan enam dimensi. Dimensi yang digunakan pada penelitian ini adalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, aksesibilitas fisik dan informasi, serta keuangan dan kelembagaan desa. Namun berdasarkan penelitian dari Abdullah (2002), keuangan dan kelembagaan desa adalah dua dimensi yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini digunakan enam dimensi sebagai berikut: pendidikan, kesehatan, perekonomian, aksesibilitas fisik dan informasi, keuangan, serta kelembagaan desa.

Selanjutnya, keseluruhan data keenam dimensi (variabel) tersebut kemudian ditransformasikan sedemikian rupa sehingga menjadi "*comparable*". Dalam hal ini digunakan metode *standardized score* yang merupakan perbandingan relatif untuk melihat seberapa bagus kinerja suatu desa tertentu dibandingkan dengan rata-rata desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, unit pengukuran sudah tidak relevan lagi. *Standardized score* tidak memiliki satuan pengukuran karena hanya mengukur kinerja relatif di antara desa-desa, apapun indikatornya. Secara statistik, ini mengukur berapa besar *standard deviations* dari setiap desa dari rata-rata seluruh desa. Dengan demikian, standardisasi data bertujuan untuk menyamakan unit pengukuran dari setiap variabel, sehingga meskipun pada mulanya variabel-variabel mempunyai unit pengukuran yang berbeda, transformasi yang dilakukan menjadikan seluruh variabel menjadi *comparable*.

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan mengambil kondisi sosial ekonomi perdesaan di D.I. Yogyakarta dalam bentuk data PODES (Potensi Desa) tahun 2018 (BPS, 2018), yaitu tahun terakhir dengan kelengkapan dan ketersediaan data yang ada. Sumber utama data sekunder penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data lainnya berasal dari Bappeda Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota.

Besarnya populasi pada penelitian ini mencakup 392 desa di Provinsi DIY yang berada di wilayah administratif pada empat kabupaten yaitu Kulonprogo, Sleman, Gunungkidul dan Bantul. Untuk memberikan gambaran perbedaan pola pengaruh masing-masing faktor penentu daya saing daerah antardesa di DIY, analisis dilakukan berdasarkan klasifikasi status desa dengan kategori Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal.

Sampel pada penelitian ini adalah juga populasi dari keseluruhan desa yang berada di Provinsi DIY berdasarkan klasifikasi status desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Tahapan penghitungan skor indikator daya saing desa dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut, di mana jumlah desa  $N = 392$ , banyaknya variabel/ indikator  $M = 6$ .

Langkah 1: Menghitung nilai rerata dari indikator  $j$  ( $j = 1, \dots, M$ ) untuk desa  $i$ .

$$\bar{X}_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_{ij}, \dots \dots \dots (3.1)$$

Di mana  $X_{ij}$  adalah nilai desa  $i$  ( $i = 1, \dots, N$ ) untuk indikator  $j$ .

Langkah 2: Menghitung *standard deviation* (SD) untuk setiap indikator  $j$  ( $j = 1, \dots, M$ ):

$$SD_j = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_{ij} - \bar{X}_j)^2} \dots \dots \dots (3.2)$$

Langkah 3: Menghitung *standardized value* (SV) dari setiap indikator  $j$  ( $j = 1, \dots, M$ ) untuk masing-masing desa  $i$  ( $i = 1, \dots, N$ ):

$$SVI_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{SD_j} \dots \dots \dots (3.3)$$

Langkah 4: Menghitung peringkat *standardized value* dari masing inidikator  $j$  ( $j = 1, \dots, M$ ) untuk setiap provinsi  $i$  ( $i = 1, \dots, N$ ):

$$RSV_{ij} = \begin{cases} + SVI_{ij} : \text{di atas rata-rata nasional} \\ \text{dan jika nilainya tinggi berarti} \\ \text{peringkat bagus.} \\ - SVI_{ij} : \text{di bawah rata-rata nasional} \\ \text{dan jika nilainya mendekati 0} \\ \text{berarti peringkat baik.} \end{cases}$$

Langkah 5 : Untuk setiap indikator  $j$  ( $j = 1, \dots, M$ ), dapat diperoleh urutan peringkat desa. Desa dengan nilai RSVI yang lebih rendah untuk indikator  $j$  berada di peringkat bawah dari desa yang memiliki nilai lebih tinggi.

Langkah 6: Menghitung jumlah keseluruhan nilai skor daya saing desa  $i$  dari tiga indikator  $j$  ( $j = 1, \dots, M$ ) untuk menentukan peringkat daya saing 392 desa di Provinsi D.I. Yogyakarta:

$$IDS_i = 0,25(RSVI_{ij,1}) + 0,25(RSVI_{ij,2}) + 0,25(RSVI_{ij,3}) + 0,25(RSVI_{ij,4}) \quad (4.4)$$

Langkah 7: Untuk keseluruhan setiap indikator  $j$  ( $j = 1, \dots, M$ ), dapat diperoleh urutan peringkat desa secara regional. Desa dengan nilai RSVI yang lebih rendah untuk seluruh indikator  $j$  berada di peringkat bawah dari desa yang memiliki nilai/skor daya saing lebih tinggi.

Langkah 8: Hasil penghitungan keseluruhan skor daya saing desa dipergunakan untuk membandingkan capaian daya saing masing-masing desa di Provinsi D.I. Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah 73,32, lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPD secara nasional (59,36). Jumlah desa di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebanyak 392 desa, yang terbagi dalam dua kategori yaitu desa mandiri sebanyak 158 desa (40,31 persen) dan desa berkembang sebanyak 234 desa (59,69 persen). Provinsi D.I. Yogyakarta termasuk salah satu provinsi yang sudah tidak memiliki desa tertinggal.

Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta berada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 76,13. Jumlah desa di Kabupaten Bantul sebanyak 75 desa, dengan jumlah desa mandiri sebanyak 43 desa dan 32 desa lainnya masih termasuk kategori berkembang. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Desa terendah di Provinsi D.I. Yogyakarta ada di Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 71,02. Jumlah desa di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 144 desa, 41 diantaranya sudah termasuk desa mandiri dan 103 desa lainnya masih termasuk kategori berkembang (BPS, 2018).

Berdasarkan dimensinya, dimensi dengan nilai rata-rata indeks tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan (86,73), sedangkan rata-rata indeks terendah ada pada Dimensi Kondisi Infrastruktur (59,79). Sementara itu, rata-rata indeks tiga dimensi lainnya adalah Dimensi Aksesibilitas/Transportasi sebesar 80,91; Dimensi Pelayanan Dasar sebesar 76,69; dan Dimensi Pelayanan Umum sebesar 66,94. Hasil ini berbeda dengan temuan studi Saputri dan Sirait (2020) di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa dimensi keuangan sebagai faktor utama pembentuk daya saing desa.

Selanjutnya, status perkembangan desa di D.I. Yogyakarta pada Tahun 2019 terdiri dari 49 Desa Mandiri, 204 Desa Maju, dan 139 Desa Berkembang, tak ada satupun desa yang berstatus tertinggal atau sangat tertinggal. Hal ini merupakan kemajuan dibanding kondisi Tahun 2018 dimana jumlah Desa Mandiri sebanyak 29, Desa Maju 183, Desa Berkembang sejumlah 175 desa, dan terdapat Desa Tertinggal sejumlah 5 desa. Khusus untuk Kabupaten Gunungkidul ada 11 Desa Mandiri, 78 Desa Maju, dan 55 Desa Berkembang, sebuah perkembangan positif dibanding Tahun 2018 dimana baru ada 7 Desa Mandiri (BPS DIY, 2020).

Sementara di Kabupaten Sleman, ada peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) dari 86 desa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni IDM Desa Mandiri sebanyak 22 desa, IDM Desa Maju sebanyak 50 desa dan IDM Desa Berkembang sebanyak 14 desa. Untuk Kabupaten Kulon Progo status Mandiri meningkat dari 3 menjadi 4, status Maju dari 21 menjadi 40, status Berkembang turun dari 63 sedangkan status tertinggal sudah tidak ada sejak pemutakhiran IDM tahun 2019.

Nilai indeks daya saing desa yang terbentuk berkisar antara 43,65 hingga 95,28. Rata-rata indeks daya saing desa di Provinsi DIY sebesar 67,45 atau termasuk kategori sedang. Hal ini sejalan dengan hasil studi Saputri dan Sirait (2020) dalam penelitian tentang daya saing desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian juga menunjukkan dimensi kelembagaan desa memiliki skor dimensi paling

menyebar (*heterogen*) dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal ini menandakan bahwa dimensi kelembagaan desa merupakan dimensi utama yang menjadi pembeda kondisi daya saing antar wilayah. Sedangkan dimensi perekonomian memiliki skor dimensi yang paling *homogen*. Hal ini menunjukkan kalau dimensi perekonomian memberikan sumbangan paling sedikit terhadap keberagaman kondisi daya saing desa di D.I. Yogyakarta. Atau lebih praktisnya, dapat dikatakan bahwa ketersediaan infrastruktur perekonomian dan kondisi perekonomian di antara desa-desa di D.I. Yogyakarta tak jauh berbeda. Walaupun demikian, ada beberapa desa yang infrastruktur maupun kondisi perekonomiannya jauh lebih baik dari desa lainnya.

Dimensi aksesibilitas fisik dan informasi, keuangan, dan pendidikan memiliki skor dimensi yang berkumpul di nilai besar (cenderung besar). Secara praktisnya, dapat dikatakan bahwa aksesibilitas fisik dan informasi, kondisi kelembagaan desa, serta infrastruktur pendidikan mayoritas desa di D.I. Yogyakarta sudah memadai.

Sedangkan untuk dimensi kesehatan dan perekonomian memiliki distribusi data yang menceng kanan (*skewness* positif). Hal ini berarti kedua dimensi ini memiliki skor dimensi yang berkumpul di nilai kecil (cenderung kecil). Dengan kata lain, kondisi infrastruktur kesehatan dan perekonomian desa di D.I. Yogyakarta masih perlu pembenahan. Terutama untuk infrastruktur perekonomian yang memiliki skor dimensi paling kecil dibanding dimensi yang lain. Dari sini dapat diketahui bahwa, infrastruktur perekonomian maupun kondisi perekonomian desa seperti keberadaan industri-industri di desa perlu dijadikan prioritas pembangunan untuk peningkatan daya saing desa di D.I. Yogyakarta.

Nilai indeks daya saing desa (IDS) memiliki rata-rata 67,45 (kategori sedang). Berdasarkan hasil ini, dapat diketahui bahwa banyak desa yang nilai IDS-nya berada di bawah rata-rata IDS desa di D.I. Yogyakarta, sebanyak 234 desa dari total 392 desa atau sekitar 59,69% desa memiliki nilai IDS di bawah rata-rata desa. Hal ini menandakan bahwa masih banyak desa-desa di D.I. Yogyakarta yang memerlukan



kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saingnya. Lebih jauh, rentang nilai IDS untuk desa di D.I. Yogyakarta adalah lebih dari 30 hingga kurang dari 90. Rentang yang besar ini menandakan bahwa di desa terjadi gap daya saing. Artinya ada desa yang daya saingnya sangat bagus (kategori daya saing tinggi), namun ada juga desa yang daya saingnya belum memadai (kategori daya saing rendah).

## KESIMPULAN

Nilai indeks daya saing desa yang terbentuk berkisar antara 43,65 (Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul) hingga 95,28 (Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul). Rata-rata indeks daya saing desa di D.I. Yogyakarta sebesar 67,45 atau termasuk kategori sedang. Aksesibilitas fisik dan informasi, kondisi kelembagaan desa, serta infrastruktur pendidikan mayoritas desa di D.I. Yogyakarta sudah memadai sedangkan kondisi infrastruktur kesehatan, keuangan, dan perekonomian desa di D.I. Yogyakarta masih perlu pembenahan terutama untuk infrastruktur perekonomian. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul termasuk kabupaten dengan kategori daya saing rendah. Mayoritas berada pada kategori daya saing sedang, kecuali untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo termasuk ke dalam kategori daya saing tinggi. Terjadi ketidakmerataan daya saing dan yang sangat kentara antarkabupaten (kesenjangan IDS di kabupaten lebih besar). Nilai IDS desa memiliki rata-rata 67,45 (IDS sedang) sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum daya saing desa di D.I. Yogyakarta masih perlu ditingkatkan.

## REFERENSI

Abdullah, Piter. 2002. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta, BPFE, Februari 2002.

Audretsch, D. dan Keilbach, M. 2004. "Entrepreneurship and Regional Growth: An Evolutionary Interpretation". *Journal of Evolutionary Economics*, 14 (5), pp.605-616.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY. 2020 *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2020: "Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan."*

Bank Indonesia— LP3E FE Unpad. 2008. *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bappeda Provinsi DIY. 2014. *Laporan Akhir Penyusunan Analisis Daya Saing Daerah*.

Barkley, D. L. 2008. *Evaluations of Regional Competitiveness: Making a case for case studies. – The Review of Regional Studies*, 2: 212-143.

Bristow, G. 2005. "Everyone's A 'Winner': Problematising The Discourse of Regional Competitiveness." *Journal of Economic Geography*, 5 (3), pp. 285-304.

Camagni, R. 2002. *On The Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studies*, 39, pp. 2395-2411.

Castellacci, F., dan Archibugi, D. 2008. "The Technology Clubs: The Distribution of Knowledge Across Nations." *Research Policy*, 37 (10), 1659-1673.

Cooke, P. 2004. "Regional Innovation Systems: An Evolutionary Approach." Dalam Cooke, P., Heidenreich, M. dan Braczyk, H.-J. (eds) *Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalised World*, 2nd Edition, London: Routledge, pp. 1-18.

Danindro, Bimo Aji Dimas dan Harmawanti Marhaeny.(2020). *Kajian Indeks Daya Saing Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* Volume 5 Nomor 2.

Delgado, M., Christian Ketels, Michael E. Porter, Scott Stern (2012). *The Determinants of National Competitiveness*. NBER Working Paper 18249.

- Gardiner, B., Martin, R. dan Tyler, P. 2004. Competitiveness, Productivity and Economic Growth Across the European Regions. *Regional Studies*, 38: 1045-1067.
- Garofoli, G. 2002. Local Development in Europe: Theoretical Models and International Comparisons. *European Urban and Regional Studies*, 9, pp. 225-239.
- Huggins, R, Izushi, H., Prokop, D. dan Thompson, P. 2014. "Regional Competitiveness, Economic Growth and Stages of Development". *Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci*, vol. 32, (2), pp. 255-283.
- Kitson, M., Martin, R. dan Tyler, P. 2004. Regional competitiveness: An elusive yet key concept? *Regional Studies*, 38, pp. 991-999.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2005. Laporan Hasil Penelitian: Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Lawson, C. dan Lorenz, E. 1999. Collective learning, tacit knowledge and regional innovative capacity. *Regional Studies*, 33, pp. 305-317.
- Lengyel, Imre dan Janos Rechnitzer. 2013. Drivers of Regional Competitiveness in the Central European Countries. *Transit Stud Rev* (2013) 20:421-435 DOI 10.1007/s11300-013-0294-2.
- Maillat, D. 1998. Innovative milieux and new generations of regional policies. *Entrepreneurship and Regional Development*, 10, pp. 1-16.
- Malecki, E. J. 2007. Cities and regions competing in the global economy: knowledge and local development policies. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 25(3), pp. 638-654.
- Martin, R., Kitson, M. dan P. Tyler. 2006. *Regional Competitiveness*. London: Routledge.
- Meyer-Stamer, J. 2008. "Systematic Competitiveness and Local Economic Development" dalam Shamin Bodhanya (ed.) *Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices*.
- Porter, M. E. 2007. Competitiveness: implications for Central Europe and the Czech Republic. Paper presented in Prague, 22 October.
- Republik Indonesia. 2014. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Saputri, Winda Luvi dan Timbang Sirait. 2020. Penghitungan Indeks Komposit Daya Saing Desa/Kelurahan Menggunakan CATPCA: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Prosiding: Seminar Nasional Official Statistics 2019. Jakarta: Politeknik Statistika STIS.
- Schwab, K. and Porter, M. E. 2007. *The Global Competitiveness Report 2007-2008*. World Economic Forum. Geneva, Switzerland.
- Tan, Khee G., Nurina Merdikawati, Mulya Amri, Tang Kong Yam. 2014. Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah: Menjaga Momentum Pertumbuhan Indonesia. Edisi 2014. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.
- Werker C. dan Athreye S., 2004. Marshall's disciples: knowledge and innovation driving regional economic development and growth. *Journal of Evolutionary Economics* 14.505-523.